



TRIWULAN I TAHUN 2023

LAPORAN KINERJA

**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PENGUATAN DAYA SAING PRODUK
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Sekretariat Ditjen PDSPKP) Triwulan I Tahun 2023 sebagai wujud pertanggungjawaban kepada stakeholders sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini merupakan media akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban sebagai amanah yang diemban organisasi dan tanggung jawab pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi. LKj Sekretariat Ditjen PDSPKP memuat pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Ditjen PDSPKP.

Kami berharap agar laporan ini dapat memenuhi harapan sebagai media pertanggungjawaban kepada *stakeholders* dan pemacu peningkatan kinerja bagi organisasi Sekretariat Ditjen PDSPKP.



Jakarta, 18 April 2023

Sesditjen PDSPKP

Machmud

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sekretariat Ditjen PDSPKP telah menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023. Berdasarkan perjanjian kinerja dimaksud, terdapat 18 (delapan belas) Indikator Kinerja yang terdiri dari 5 (lima) bersifat triwulanan, 2 (dua) bersifat semesteran, dan 11 (sebelas) bersifat tahunan.

Pencapaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sekretariat Ditjen PDSPKP Triwulan I Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Dari 18 indikator kinerja tersebut, sebanyak 5 indikator kinerja dapat diukur pada Triwulan I Tahun 2023 dan kelimanya telah mencapai target Triwulan I Tahun 2023;
2. Kelima indikator kinerja dimaksud yaitu (1) Rasio Jumlah Pemberitaan Negatif Bidang PDSPKP terhadap Total Pemberitaan Sektor KP, (2) Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan Setditjen PDSPKP, (3) Persentase Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Ditjen PDSPKP yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar, (4) Persentase Pemenuhan Layanan Internal/*Overhead* lingkup Ditjen PDSPKP, dan (5) Jumlah Pemenuhan Layanan Perkantoran lingkup Ditjen PDSPKP;
3. Dua indikator kinerja yang bersifat semesteran yaitu (1) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Setditjen PDSPKP dan (2) Indeks Profesionalitas ASN lingkungan Setditjen PDSPKP;
4. Sebelas indikator kinerja yang bersifat tahunan yaitu (1) Nilai PMPRB lingkup Ditjen PDSPKP, (2) Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di lingkungan Ditjen PDSPKP, (3) Nilai Pengawasan Kearsipan di Lingkungan Ditjen PDSPKP, (4) Persentase Dokumen Kerjasama yang Disusun/Ditindaklanjuti oleh Ditjen PDSPKP, (5) Persentase Pemenuhan Dokumen Maturitas SPIP Ditjen PDSPKP, (6) Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di

lingkungan Setditjen PDSPKP, (7) Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI lingkungan Sekretariat Ditjen PDSPKP, (8) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) di Lingkungan Sekretariat Ditjen PDSPKP, (9) Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Ditjen PDSPKP, (10) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Setditjen PDSPKP, dan (11) Persentase Lembar Kerja Data Produksi yang Tervalidasi Setditjen PDSPKP;

5. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Sekretariat Ditjen PDSPKP yang ditunjukkan pada Aplikasi Kinerjaku mencapai 105,41%.

Pada tahun 2023, pagu anggaran pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan yang dikelola oleh Sekretariat Ditjen PDSPKP adalah sebesar Rp138.080.000.000,-. Kemudian terdapat *Auto Adjustment* (AA) adalah sebesar Rp21.143.215.000,- sehingga pagu anggaran menjadi sebesar Rp116.936.785.000,- yang seluruhnya merupakan APBN murni. Sampai dengan triwulan I tahun 2023, penyerapan anggaran Sekretariat Ditjen PDSPKP adalah sebesar Rp18.972.896.979,-. Realisasi anggaran ini setara dengan 13,74% terhadap pagu anggaran awal atau 16,22 terhadap pagu anggaran pasca AA.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Tugas dan Fungsi.....	2
D. Sumber Daya Manusia	3
E. Sistematika Penyajian LKj.....	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	4
A. Rencana Strategis Tahun 2020-2024	4
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	4
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	7
A. Capaian Kinerja.....	7
B. Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	10
Sasaran Kegiatan 1. Terlaksananya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Lingkungan Ditjen PDSPKP	10
1. Nilai PMPRB lingkup Ditjen PDSPKP	10
2. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang- Undangan di lingkungan Ditjen PDSPKP	13
3. Nilai Pengawasan Kearsipan di Lingkungan Ditjen PDSPKP	16
4. Persentase Dokumen Kerjasama yang Disusun/Ditindaklanjuti oleh Ditjen PDSPKP.....	18
5. Rasio Jumlah Pemberitaan Negatif Bidang PDSPKP terhadap Total Pemberitaan Sektor KP	22

6.	Persentase Pemenuhan Dokumen Maturitas SPIP Ditjen PDSPKP	24
7.	Indeks Profesionalitas ASN lingkungan Setditjen PDSPKP	25
8.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan Setditjen PDSPKP	30
9.	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI lingkungan Sekretariat Ditjen PDSPKP	32
10.	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan Setditjen PDSPKP	33
11.	Persentase Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Ditjen PDSPKP yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar	35
12.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Setditjen PDSPKP	36
13.	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) di Lingkungan Sekretariat Ditjen PDSPKP	38
14.	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Ditjen PDSPKP .	39
15.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Setditjen PDSPKP	40
16.	Persentase Lembar Kerja Data Produksi yang Tervalidasi Setditjen PDSPKP	44
	Sasaran Kegiatan 2. Terwujudnya Layanan Sarana dan Prasarana Internal lingkup Ditjen PDSPKP yang Efisien, Efektif, dan Berorientasi pada Layanan Prima	47
17.	Persentase Pemenuhan Layanan Internal/Overhead lingkup Ditjen PDSPKP	47
	Sasaran Kegiatan 3. Terwujudnya Pelaksanaan Layanan Perkantoran lingkup Ditjen PDSPKP yang Efisien, Efektif, dan Berorientasi pada Layanan Prima	48
18.	Jumlah Pemenuhan Layanan Perkantoran lingkup Ditjen PDSPKP	48
C.	Realisasi Anggaran	50
	BAB IV PENUTUP	51
	DAFTAR GAMBAR	viii
	DAFTAR LAMPIRAN	x

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Sekretariat Ditjen PDSPKP Tahun 2023	5
Tabel 2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Sekretariat Ditjen PDSPKP Triwulan I Tahun 2023	8
Tabel 3. Ikhtisar Pencapaian Nilai PMPRB Lingkup Ditjen PDSPKP	11
Tabel 4. Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan lingkup Ditjen PDSPKP Tahun 2023	13
Tabel 5. Ikhtisar Pencapaian Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di lingkungan Ditjen PDSPKP	14
Tabel 6. Ikhtisar Pencapaian Nilai Pengawasan Kearsipan di lingkungan Ditjen PDSPKP	16
Tabel 7. Ikhtisar Pencapaian Persentase Dokumen Kerjasama yang Disusun/Ditindaklanjuti oleh Ditjen PDSPKP	18
Tabel 8. Ikhtisar Pencapaian Rasio Jumlah Pemberitaan Negatif Bidang PDSPKP terhadap Total Pemberitaan Sektor KP	23
Tabel 9. Rekapitulasi Jumlah Pemberitaan Ditjen PDSPKP Berdasarkan Tone Pemberitaan	24
Tabel 10. Ikhtisar Pencapaian Persentase Pemenuhan Dokumen Maturitas SPIP Ditjen PDSPKP	25
Tabel 11. Ikhtisar Pencapaian Indeks Profesionalitas ASN lingkungan Setditjen PDSPKP	26
Tabel 12. Ikhtisar Pencapaian Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Ditjen PDSPKP	30
Tabel 13. Ikhtisar Pencapaian Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI lingkungan Sekretariat Ditjen PDSPKP	33
Tabel 14. Ikhtisar Pencapaian Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan Setditjen PDSPKP	34

Tabel 15. Ikhtisar Pencapaian Persentase Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Ditjen PDSPKP yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar	36
Tabel 16. Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Setditjen PDSPKP	37
Tabel 17. Ikhtisar Pencapaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) di Lingkungan Sekretariat Ditjen PDSPKP	39
Tabel 18. Ikhtisar Pencapaian Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Ditjen PDSPKP	40
Tabel 19. Ikhtisar Pencapaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Setditjen PDSPKP	41
Tabel 20. Ikhtisar Pencapaian Persentase Lembar Kerja Data Produksi yang Tervalidasi Setditjen PDSPKP	45
Tabel 21. Ikhtisar Pencapaian Persentase Pemenuhan Layanan Internal/Overhead lingkup Ditjen PDSPKP	47
Tabel 22. Ikhtisar Pencapaian Jumlah Pemenuhan Layanan Perkantoran lingkup Ditjen PDSPKP	48
Tabel 23. Realisasi Anggaran Sekretariat Ditjen PDSPKP Triwulan I Tahun 2023 Berdasarkan Jenis Belanja.....	50

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Dashboard NKO pada SAPK Unit Kerja Sekretariat Ditjen PDSPKP Triwulan I Tahun 2023	7
Gambar 2. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dan Penyusunan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Ditjen PDSPKP	12
Gambar 3. Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Petugas Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PDSPKP	12
Gambar 4. Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip	17
Gambar 5. Benchmarking Pengelolaan Arsip	17
Gambar 6. Penyusunan dan Penyusutan Arsip Inaktif	17
Gambar 7. Bimbingan Teknis Penilaian Kinerja pada Aplikasi e-Kinerja BKN dalam rangka Pengembangan SDM Aparatur	28
Gambar 8. Rapat Monitoring dan Evaluasi Disiplin Kinerja Pegawai lingkup Ditjen PDSPKP tahun 2022	28
Gambar 9. Pembahasan Bahan Ajar Pelatihan Dasar Jabatan Fungsional APHP dan PM HKP dalam rangka Pengembangan Jabatan Fungsional Binaan Ditjen PDSPKP	28
Gambar 10. Kegiatan dalam rangka Pengembangan Jabatan Fungsional Binaan Ditjen PDSPKP	29
Gambar 11. Kegiatan Uji Kompetensi JF PM HKP dalam rangka Pengembangan JF binaan PDSPKP	29
Gambar 12. Pelantikan JF dan Sumpah Pegawai APK APBN	29
Gambar 13. Rapat Pembahasan Standar Kualitas Hasil Kerja APHP tanggal 29 Maret 2023	30
Gambar 14. Dialog Kinerja Organisasi Ditjen PDSPKP Tahun 2023	32

Gambar 15. Kegiatan pengukuran kinerja, verifikasi capaian kinerja, dan evaluasi rencana aksi lingkup Ditjen PDSPKP Periode Triwulan IV Tahun 2022 pada Tanggal 2 Januari 2023	32
Gambar 16. Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja lingkup Ditjen PDSPKP Periode Triwulan IV Tahun 2023 pada Tanggal 18-20 Januari 2023	32
Gambar 17. Persiapan Penyusunan Laporan BMN Tahun 2022.....	43
Gambar 18. Uji Petik Evaluasi Pemanfaatan BMN	43
Gambar 19. Cek Fisik BMN di Benoa dan Bitung	44
Gambar 20. Pembahasan Usulan Perubahan RKBMN Tahun 2023	44
Gambar 21. Pendampingan Pemeriksaan Fisik Kapal Jananuraga	44
Gambar 22. Kegiatan Percepatan Validasi Data Bidang PDSPKP Tahun 2022 di Beberapa Provinsi	46



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Sekretariat Ditjen PDSPKP Tahun 2023

Lampiran 2. Realisasi Anggaran Sekretariat Ditjen PDSPKP pada Triwulan I Tahun 2023 berdasarkan Aplikasi Omspan Kemenkeu



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

LKj Sekretariat Ditjen PDSPKP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Sekretariat Ditjen PDSPKP atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKj Sekretariat Ditjen PDSPKP Triwulan I Tahun 2023 menjelaskan tentang pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan yang memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja pada Triwulan I Tahun 2023. Tujuan penyusunan laporan ini adalah sebagai laporan atas kinerja yang telah diperjanjikan kepada Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dan memberikan informasi kinerja kepada publik atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Sekretariat Ditjen PDSPKP untuk meningkatkan kinerjanya.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan LKj Sekretariat Ditjen PDSPKP Triwulan I Tahun 2023 adalah untuk mengkomunikasikan pencapaian sasaran strategis kepada para *stakeholders* guna mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi mandat atau amanah. Dengan demikian, LKj ini merupakan sarana untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai pada Triwulan I Tahun 2023 dan bagaimana proses pencapaiannya.

C. Tugas dan Fungsi

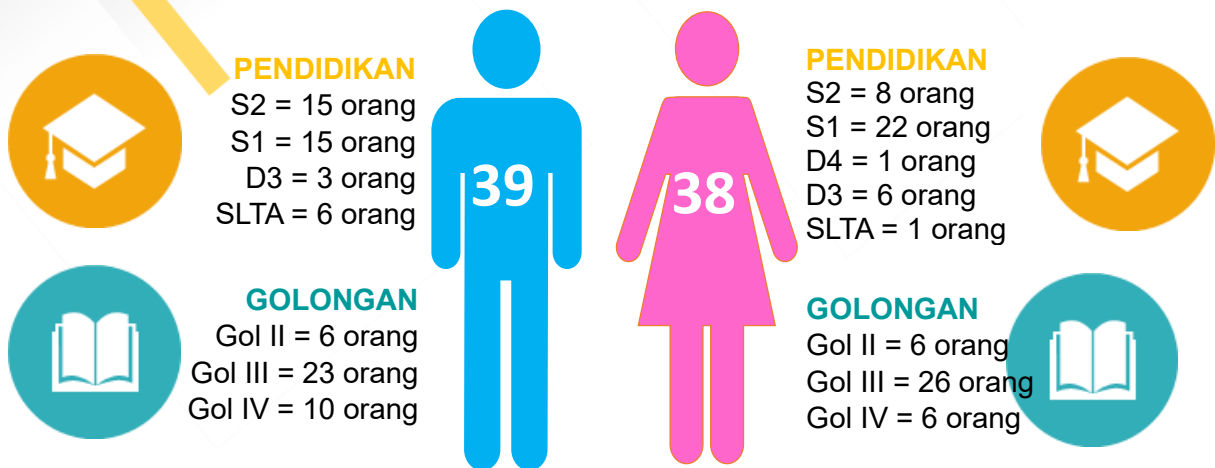
Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, kedudukan Ditjen PDSPKP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

Dalam menyelenggarakan program dan kegiatan, Sekretariat Direktorat Jenderal PDSPKP mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Sekretariat Ditjen PDSPKP menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan data dan kinerja, penyiapan bahan pimpinan, serta pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
2. Koordinasi dan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia aparatur, penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
3. Koordinasi penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
4. Koordinasi dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama; dan
5. Koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, barang milik negara, dan ketatausahaan.

D. Sumber Daya Manusia



E. Sistematika Penyajian LKj

Laporan kinerja Sekretariat Ditjen PDSPKP mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PDSPKP mencakup hasil yang ingin dicapai selama tahun 2020-2024 oleh Sekretariat Ditjen PDSPKP. Renstra tersebut diharapkan mampu mengarahkan organisasi dan seluruh pegawai untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan mandat yang diterima. Renstra memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi dengan mempertimbangkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Sebagai organisasi yang berada di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), maka Visi Ditjen PDSPKP tahun 2020-2024 adalah “Mewujudkan Pengelolaan Perikanan dan Kelautan yang Berkelanjutan untuk Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri” dalam rangka mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden dalam urusan Kelautan dan Perikanan.

Dalam mencapai visi tersebut, Sekretariat Ditjen PDSPKP menjalankan misi Ditjen PDSPKP yakni melaksanakan tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya lingkup Ditjen PDSPKP.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja Sekretariat Ditjen PDSPKP merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, dan merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja.

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Penetapan Kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian kinerja Sekretariat Ditjen PDSPKP pada tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 1. di bawah ini.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Sekretariat Ditjen PDSPKP Tahun 2023

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target
1	Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di Lingkungan Ditjen PDSPKP	1	Nilai PMPRB lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	33,5
		2	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di lingkungan Ditjen PDSPKP (%)	100
		3	Nilai Pengawasan Kearsipan di Lingkungan Ditjen PDSPKP (Nilai)	75
		4	Persentase Dokumen Kerjasama yang Disusun/Ditindaklanjuti oleh Ditjen PDSPKP (%)	80
		5	Rasio Jumlah Pemberitaan Negatif Bidang PDSPKP terhadap Total Pemberitaan Sektor KP (%)	≤5
		6	Persentase Pemenuhan Dokumen Maturitas SPIP Ditjen PDSPKP (%)	100
		7	Indeks Profesionalitas ASN lingkungan Setditjen PDSPKP (Indeks)	83,2
		8	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan Setditjen PDSPKP (Nilai)	80,5
		9	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI lingkungan Sekretariat Ditjen PDSPKP (%)	≤0,5
		10	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan	75

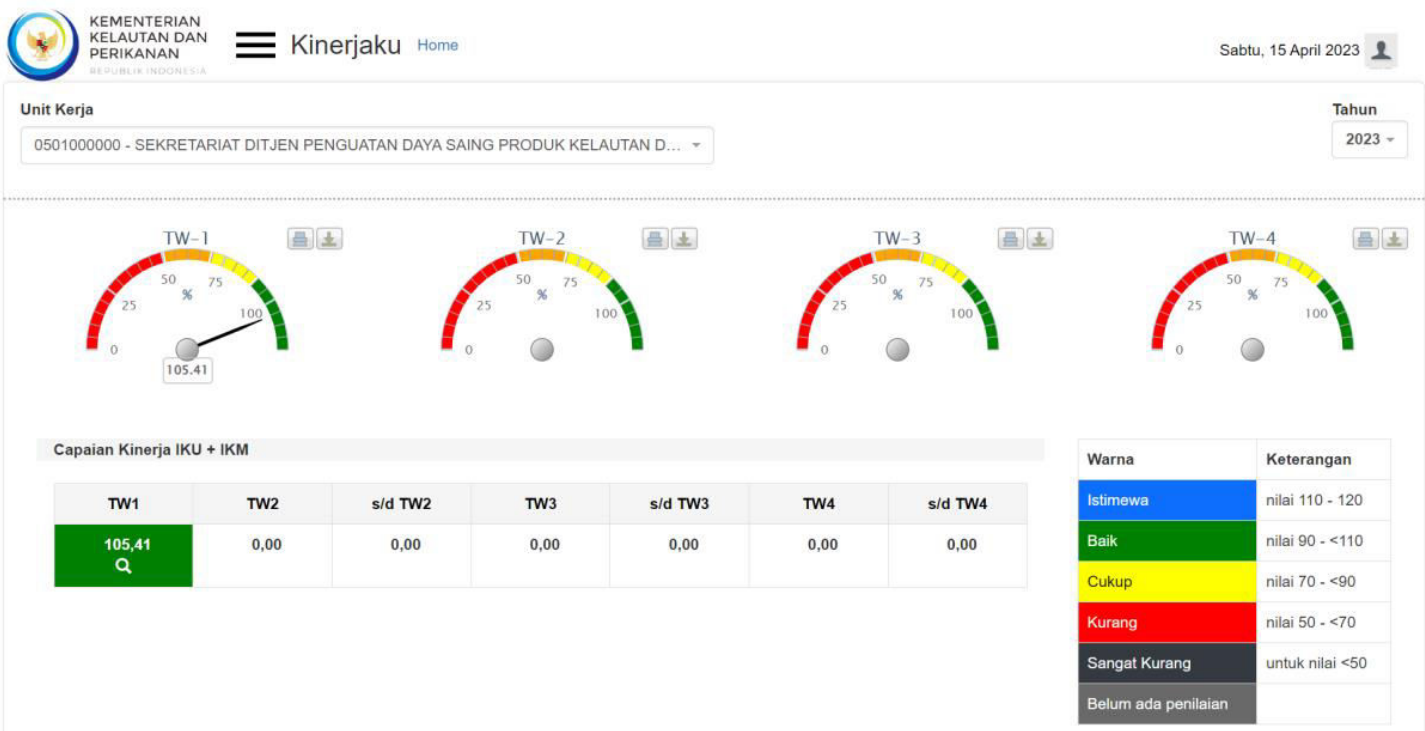
Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target
			Kinerja di lingkungan Setditjen PDSPKP (%)	
		11	Persentase Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Ditjen PDSPKP yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)	92
		12	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Setditjen PDSPKP (Nilai)	89
		13	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) di Lingkungan Sekretariat Ditjen PDSPKP (Nilai)	86
		14	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Ditjen PDSPKP (%)	77,5
		15	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Setditjen PDSPKP (%)	77,5
		16	Persentase Lembar Kerja Data Produksi yang Tervalidasi Setditjen PDSPKP (%)	100
2	Terwujudnya Layanan Sarana dan Prasarana Internal lingkup Ditjen PDSPKP yang Efisien, Efektif, dan Berorientasi pada Layanan Prima	17	Persentase Pemenuhan Layanan Internal/ <i>Overhead</i> lingkup Ditjen PDSPKP (%)	100
3	Terwujudnya Pelaksanaan Layanan Perkantoran lingkup Ditjen PDSPKP yang Efisien, Efektif, dan Berorientasi pada Layanan Prima	18	Jumlah Pemenuhan Layanan Perkantoran lingkup Ditjen PDSPKP (Bulan)	12

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Pada tahun 2023, Sekretariat Ditjen PDSPKP telah menyempurnakan dan menetapkan 3 (tiga) sasaran kegiatan dengan 18 (delapan belas) indikator kinerja. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara terukur keseluruhan yang bisa diperoleh dari Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK). NKO Sekretariat Ditjen PDSPKP Triwulan I Tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Dashboard NKO pada SAPK Unit Kerja Sekretariat Ditjen PDSPKP Triwulan I Tahun 2023

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat Ditjen PDSPKP Triwulan I Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Sekretariat Ditjen PDSPKP Triwulan I Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	TARGET		REALISASI TW I 2023	% TERHADAP TARGET	
		TAHUN 2023	TW I 2023		TAHUN 2023	TW I 2023
1 Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di Lingkungan Ditjen PDSPKP	1 Nilai PMPRB lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	33.5				
	2 Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di lingkungan Ditjen PDSPKP (%)	100				
	3 Nilai Pengawasan Kearsipan di Lingkungan Ditjen PDSPKP (Nilai)	75				
	4 Persentase Dokumen Kerjasama yang Disusun/Ditindaklanjuti oleh Ditjen PDSPKP (%)	80				
	5 Rasio Jumlah Pemberitaan Negatif Bidang PDSPKP terhadap Total Pemberitaan Sektor KP (%)	5	5	0	120	120
	6 Persentase Pemenuhan Dokumen Maturitas SPIP Ditjen PDSPKP (%)	100				
	7 Indeks Profesionalitas ASN lingkungan Setditjen PDSPKP (Indeks)	83.2				
	8 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan Setditjen PDSPKP (Nilai)	80.5				
	9 Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI lingkungan Sekretariat Ditjen PDSPKP (%)	0.5				
	10 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang	75	75	96.58	128.77	128.77

		Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan Setditjen PDSPKP (%)					
		11 Persentase Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Ditjen PDSPKP yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)	92	92	100	108.70	108.70
		12 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Setditjen PDSPKP (Nilai)	89				
		13 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) di Lingkungan Sekretariat Ditjen PDSPKP (Nilai)	86				
		14 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Ditjen PDSPKP (%)	77.5				
		15 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Setditjen PDSPKP (%)	77.5				
		16 Persentase Lembar Kerja Data Produksi yang Tervalidasi Setditjen PDSPKP (%)	100				
2	Terwujudnya Layanan Sarana dan Prasarana Internal lingkup Ditjen PDSPKP yang Efisien, Efektif, dan Berorientasi pada Layanan Prima	17 Persentase Pemenuhan Layanan Internal/ <i>Overhead</i> lingkup Ditjen PDSPKP (%)	100	100	100	100.00	100.00
3	Terwujudnya Pelaksanaan Layanan Perkantoran lingkup Ditjen PDSPKP yang Efisien, Efektif, dan Berorientasi pada Layanan Prima	18 Jumlah Pemenuhan Layanan Perkantoran lingkup Ditjen PDSPKP (Bulan)	12	3	3	25.00	100.00

B. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja menjelaskan realisasi indikator kinerja, permasalahan dan kendala yang dihadapi serta upaya perbaikan yang dilakukan ke depan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan Sekretariat Ditjen PDSPKP. Analisis untuk setiap sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan 1.

Terlaksananya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Lingkungan Ditjen PDSPKP

1. Nilai PMPRB lingkup Ditjen PDSPKP

Reformasi birokrasi yang dilaksanakan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang pelaksanaannya dilakukan melalui program-program yang meliputi: (1) Manajemen Perubahan; (2) Deregulasi Kebijakan; (3) Penataan Organisasi; (4) Penataan Tatalaksana; (5) Penataan SDM Aparatur; (6) Penguatan Akuntabilitas Kinerja; (7) Penguatan Pengawasan; (8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan (9) *Quick Wins*.

Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperbaharui. Reformasi birokrasi KKP dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan kata lain reformasi birokrasi KKP merupakan langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan. Oleh karena itu KKP harus segera mengambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistemik sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien sesuai dengan visi, misi, dan strategi KKP.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Ditjen PDSPKP sebagai salah satu unit kerja eselon I yang membidangi daya saing produk kelautan dan

perikanan memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan reformasi birokrasi sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban.

Tabel 3. Ikhtisar Pencapaian Nilai PMPRB Lingkup Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW I 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW I 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW I 2022-TW I 2023 (%)
	Tahun 2023	TW I 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW I 2023	Tahun 2024		
Nilai PMPRB Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	33,5	-	34	-	-	-	-	-	

Pada tahun 2023, nilai PMPRB lingkup Ditjen PDSPKP ditargetkan sebesar 33,5. Indikator kinerja ini bersifat tahunan, sehingga capaiannya belum bisa diketahui pada triwulan I tahun 2023. Penilaian indikator kinerja ini akan dilakukan Kementerian PAN dan RB atau Inspektorat Jenderal KKP jika tidak ada penilaian dari Kementerian PAN dan RB.

Ditjen PDSPKP telah melakukan beberapa kegiatan guna mendukung pencapaian target indikator kinerja ini antara lain:

- a. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Ditjen PDSPKP tanggal 16 Januari 2023;
- b. Penyusunan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Ditjen PDSPKP Tahun 2023 tanggal 17 Januari 2023;
- c. Pembahasan Penataan Mekanisme Kerja pada Ditjen PDSPKP tanggal 24 Januari 2023;
- d. Pembahasan Proses Bisnis dan Organisasi Unit Kerja Eselon II Lingkup Ditjen PDSPKP tanggal 30 Januari 2023;
- e. Monev Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada Direktorat Pemasaran tanggal 30 Januari 2023;
- f. Kegiatan Pembahasan Usulan Proses Bisnis, Kajian Teknis, dan Tugas Fungsi Unit Kerja Eselon II Lingkup Ditjen PDSPKP tanggal 8 Februari 2023;
- g. Pembahasan usulan Uraian Tugas dan Fungsi Tim Kerja Lingkup Ditjen PDSPKP tanggal 28 februari 2023;

- h. Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Petugas Pelayanan Publik dalam mewujudkan Pelayanan Publik Ditjen PDSPKP yang Inklusif dan Prima tanggal 6 s.d 7 Maret 2023;
- i. Finalisasi Usulan Tim Kerja Lingkup Ditjen PDSPKP dan Inventarisasi Praktik Baik Reformasi Birokrasi tanggal 14 s.d 16 Maret 2023;
- j. Pembahasan Tugas dan Fungsi Unit Kerja Eselon II Lingkup Ditjen PDSPKP tanggal 28 Maret 2023.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini, Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 973.314.000 dan telah terealisasi sebesar Rp 78.581.600 (8,07%) pada triwulan I Tahun 2023.



Gambar 2. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dan Penyusunan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Ditjen PDSPKP



Gambar 3. Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Petugas Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PDSPKP

2. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di lingkungan Ditjen PDSPKP

Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di lingkungan Ditjen PDSPKP dihitung dengan cara membandingkan antara jumlah peraturan perundang-undangan yang diselesaikan hingga 31 Desember 2023 dengan jumlah peraturan perundang-undangan yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 84 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023. Berdasarkan Keputusan Menteri tersebut, program penyusunan peraturan perundang-undangan lingkup Ditjen PDSPKP tahun 2023 meliputi:

Tabel 4. Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan lingkup Ditjen PDSPKP Tahun 2023

No	Judul	Pokok Materi Muatan	Penyampaian Ke Setjen
1	Peraturan Menteri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2016 tentang Pemberlakuan SNI Tuna Dalam Kemasan Kaleng dan SNI Sarden dan Makarel dalam Kemasan Kaleng secara Wajib	a. Perubahan Nomor pemberlakuan SNI; dan b. Perubahan jenis ikan.	April 2023
2	Peraturan Menteri tentang Kemitraan Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan	a. Penyesuaian Ruang Lingkup Pengaturan Bidang Usaha dengan penanaman modal (usaha besar) yang wajib bermitra dengan koperasi dan UMKM sektor kelautan dan perikanan b. Penambahan Jenis bidang usaha baru pada sektor KP yang wajib bermitra dengan Koperasi dan UMKM yaitu usaha produksi/ekstraksi garam) Penyesuaian prinsip dan pola kemitraan usaha; c. Tahapan pelaksanaan kemitraan antara usaha besar dengan koperasi dan UMKM; d. Pembatasan kewenangan KKP pada monitoring kemitraan usaha; dan e. Penyesuaian Isi Perjanjian antara usaha besar dengan koperasi atau UMKM yang bermitra	April 2023
3	Peraturan Menteri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan	Menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1	Agustus 2023

No	Judul	Pokok Materi Muatan	Penyampaian Ke Setjen
	Perikanan Nomor 60/PERMEN-KP/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Sektor Kelautan dan Perikanan	Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat	
4	Peraturan Menteri tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/PERMENKP/2016 tentang Skala Usaha Pengolahan Ikan	Mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/PERMEN-KP/2016 tentang Skala Usaha Pengolahan ikan	Januari 2023
5	Peraturan Menteri tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan.	a. Pangkat, golongan ruang dan pengangkatan dalam jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan; b. Target Kinerja dan Angka Kredit Minimal; c. Pengusulan, penilaian, dan penetapan angka kredit; d. Kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan; dan e. Pemberhentian dari jabatan dan penangkatan kembali	Februari 2023
6	Peraturan Menteri tentang Standar Kualitas Hasil Kerja Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan	a. Standar kualitas hasil kerja Analis Pasar Hasil Perikanan; b. Pedoman Penilaian Kualitas Hasil Kerja; c. Penilaian Angka Kredit; dan d. Hasil Kerja Minimal	Februari 2023
7	Peraturan Menteri tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Ikan	a. Pengelolaan Sistem Distribusi Ikan yang dapat mempertahankan mutu dan keamanan Hasil Perikanan; b. Penerapan Distribusi Ikan yang Baik; c. Penilaian Distribusi Ikan yang Baik; dan d. Pengawasan Distribusi Ikan yang Baik.	September 2023

Tabel 5. Ikhtisar Pencapaian Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di lingkungan Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW I 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW I 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW I 2022-TW I 2023 (%)
	Tahun 2023	TW I 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW I 2023	Tahun 2024		
Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di lingkungan Ditjen PDSPKP (%)	100	-	-	42,86	42,86	-	-	-	-

Pada tahun 2023, Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di lingkungan Ditjen PDSPKP ditargetkan sebesar 100%. Indikator kinerja ini bersifat tahunan, sehingga capaiannya tidak diperhitungkan pada triwulan I tahun 2023. Namun dapat disampaikan bahwa pada triwulan I, Ditjen PDSPKP telah menyampaikan 2 (dua) progsun ke Sekretariat Jenderal yaitu

- a. Memo Nomor 218/DJPDSPKP/HK.150/II/2023 tanggal 30 Januari 2023 hal Penyampaian Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan; dan
- b. Nota Dinas Nomor 449/DJPDSPKP/HK.160/II/2023 tanggal 28 Februari 2023 hal Penyampaian Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Standar Kualitas Hasil Kerja dan Pedoman Penilaian Kualitas Hasil Kerja Analis Pasar Hasil Perikanan.

Selain itu, terdapat satu progsun yang telah disampaikan ke Setjen dan telah diundangkan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Hukum melalui Nota Dinas Nomor 470/SJ.4/HK.160/IV/2023 tanggal 3 April 2023 hal Penyampaian Salinan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2009 tentang Skala Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2016 tentang Tata Cara Penetapan Faktor X Tarif Jasa Pengadaan Es di Pelabuhan Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/PERMEN-KP/2016 tentang Skala Usaha Pengolahan Ikan, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMENKP/2018 tentang *Master Plan* Teknologi Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018-2022.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini, Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1.000.000.000,- dan pada Triwulan I Tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp175.319.961 (17,53%).

3. Nilai Pengawasan Kearsipan di Lingkungan Ditjen PDSPKP

Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara, pemerintah daerah, dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistematis dan komprehensif sehingga diperlukan pengawasan kearsipan sesuai dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan.

Tabel 6. Ikhtisar Pencapaian Nilai Pengawasan Kearsipan di lingkungan Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW I 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW I 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW I 2022-TW I 2023 (%)
	Tahun 2023	TW I 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW I 2023	Tahun 2024		
Nilai Pengawasan Kearsipan di lingkungan Ditjen PDSPKP (Nilai)	75	-	-	-	-	-	-	-	-

Pada tahun 2023, nilai pengawasan kearsipan di lingkungan Ditjen PDSPKP ditargetkan sebesar 75%. Indikator kinerja ini bersifat tahunan, sehingga capaiannya belum bisa diketahui pada triwulan I tahun 2023. Adapun upaya yang telah dilakukan Setditjen PDSPKP untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pengawasan kearsipan antara lain :

- a. Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip di Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyulihan Perikanan, Bogor, Provinsi Jawa Barat pada Tanggal 23 - 24 Februari 2023;
- b. Temu Koordinasi Pelaksanaan Penyusunan dan Penyusutan Arsip Inaktif lingkup Ditjen PDSPKP pada tanggal 10 Januari 2022 di Ruang Rapat Investasi GMB III Lantai 15 KKP;
- c. *Benchmarking* Pengelolaan Arsip Pemanfaatan Sistem Informasi Kearsipan dalam Pengelolaan Arsip Program Strategis pada tanggal 1-2 Februari 2023

di Kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

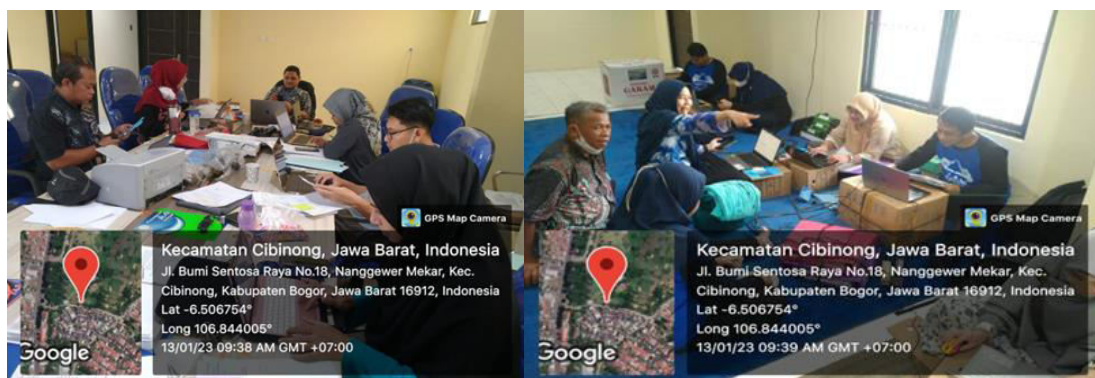
- d. Penyusunan dan penyusutan arsip inaktif lingkup Ditjen PDSPKP pada tanggal 12-13 Januari 2022 bertempat di Ruang Record Center Ditjen PDSPKP, Raiser Ikan Hias Cibinong.



Gambar 4. Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip



Gambar 5. Bencmarking Pengelolaan Arsip



Gambar 6. Penyusunan dan Penyusutan Arsip Inaktif

4. Persentase Dokumen Kerjasama yang Disusun/Ditindaklanjuti oleh Ditjen PDSPKP

Dokumen kerja sama adalah dokumen formal pengikatan hukum terhadap rencana kerja sama dengan mitra kerja sama baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dilaksanakan oleh Ditjen PDSPKP. Ada beberapa jenis kerja sama yaitu kerja sama antar Lembaga, kerja sama bilateral, kerja sama regional dan multilateral.

Tabel 7. Ikhtisar Pencapaian Persentase Dokumen Kerjasama yang Disusun/Ditindaklanjuti oleh Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW I 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW I 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW I 2022-TW I 2023 (%)
	Tahun 2023	TW I 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW I 2023	Tahun 2024		
Persentase Dokumen Kerjasama yang Disusun/ Ditindaklanjuti oleh Ditjen PDSPKP (%)	80	-	-	-	-	-	-	-	-

Pada tahun 2023, persentase dokumen kerjasama yang disusun/ditindaklanjuti oleh Ditjen PDSPKP ditargetkan sebesar 80%. Indikator kinerja ini bersifat tahunan, sehingga capaiannya belum bisa diketahui pada triwulan I tahun 2023. Kerjasama dibagi menjadi 3 yaitu kerja sama antar Lembaga, kerja sama bilateral dan kerja sama multilateral. Selama Bulan Januari s.d. Maret 2023, Ditjen PDSPKP telah melakukan beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja ini antara lain :

a. Kerja Sama Antar Lembaga

- 1) Implementasi Kegiatan Kerja Sama Ditjen PDSPKP dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
 - a) Penyiapan mekanisme, prosedur registrasi SFDA dan rencana previsit Unit Pengolahan Ikan untuk persiapan ekspor ke Arab Saudi;
- 2) Implementasi Kegiatan Kerja Sama Ditjen PDSPKP dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
 - a) Pertukaran data UPI produk kelautan dan perikanan yang masuk PROPER;

- 3) Implementasi Kegiatan Kerja Sama Ditjen PDSPKP dengan PT. Aruna Jaya Nuswantara
 - a) Sosialisasi kemitraan Aruna kepada 60-70 nelayan binaan DKP Provinsi Jawa Timur;
 - b) Pemanfaatan *Cold Storage Room* 2 Unit total 17 Ton ; ABF Room 1 Unit kapasitas 1,5 Ton ; 1 *Processing room* operational di DC Cibinong, Pasar Ikan Higienis Cimandala Kab. Bogor (DKP Kab Bogor) / Koperasi Mina Jaladri Sejahtera;
 - c) Pemanfaatan *Cold Storage Room* 1 Unit total +- 30 Ton; ABF Room 1 Unit kapasitas 2,5 Ton; 1 *Processing Room* operational di DC Subang, Cold Storage KKP Subang;
 - d) Pemanfaatan *Cold Storage Room* 1 Unit di DC Sukabumi, *Cold Storage* KKP Sukabumi;
- 4) Implementasi Kegiatan Kerja Sama Ditjen PDSPKP dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Kementerian Perdagangan
 - a) Pemetaan calon lokasi dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang Komoditas Ikan:
 - b) Sosialisasi dan inisiasi kelembagaan SRG di Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 2 Maret 2023;
 - c) Pendampingan kelembagaan SRG di Lokasi Nusa Tenggara Timur tanggal 2 Maret 2023;
- 5) Implementasi Kegiatan Kerja Sama Ditjen PDSPKP dengan Yayasan Lumbung Pangan (FOI)
 - a) Diskusi pelibatan mitra pendukung dalam rangka perluasan akses pangan bergizi, tanggal 17 Maret 2023;
- 6) Implementasi Kegiatan Kerja Sama Ditjen PDSPKP dengan Kementerian Koperasi dan UKM
 - a) Fasilitasi 34-40 UMKM pada kegiatan Bazaar Kementerian baik di KKP maupun di K/L lain;
- 7) Implementasi Kegiatan Kerja Sama Ditjen PDSPKP dengan Yayasan WWF

- a) Sekolah Lapang Tambak bersama salah satu mitra UPI yang memiliki supplier pembudidaya udang windu skala kecil di Brebes;
 - b) Dukungan WWF untuk kegiatan rangka *Foreign Buyer Mission* bagi 22 pelaku usaha yang sudah *sustainable (ASC/AIP certified)*;
- 8) Implementasi Kegiatan Kerja Sama Ditjen PDSPKP dengan Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI)
- a) Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi di Bone, Lombok Timur dan Ternate;
 - b) Pendampingan 10 koperasi berbadan hukum di Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Selatan, NTB, Sulawesi Tengah dan 15 KUB nelayan di Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi Tengah;
 - c) Fasilitasi pemenuhan persyaratan sertifikasi US-FT dan MSC dalam perikanan Yellow Fin Tuna dengan melaksanakan 9 standar FT dan 4 prinsip MSC;
 - d) Fasilitasi penyusunan FIP (*Fisheries Improvement Program*) berdasarkan standar MSC;
- 9) Implementasi Kegiatan Kerja Sama Ditjen PDSPKP dengan Yayasan Konservasi Cakrawala Indonesia
- a) Kunjungan ke PT. ASTIL dan PT. RKN tanggal 16 – 21 Februari 2023, di Sumba Timur dan Kupang;
- 10) Implementasi Kegiatan Kerja Sama Ditjen PDSPKP dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB
- a) Dukungan terhadap kegiatan IPB dalam rangka Gemarikan tanggal 4 Maret 2023;
- 11) Implementasi Kegiatan Kerja Sama Ditjen PDSPKP dengan PT. Jelajah Inovasi Teknologi (KALIKAN)
- a) Menyediakan platform kalikan.id untuk promosi dan pemasaran ikan hias berbasis online;
 - b) Penggunaan dan pengelolaan Instalasi Karantina Ikan (IKI) Raiser Ikan Hias Cibinong oleh Kalikan;
- 12) Implementasi Kegiatan Kerja Sama Ditjen PDSPKP dengan PT. Kereta Api Logistik

- a) KALOG telah membangun Cold Storage di 6 cabang yang ada di Pulau Jawa dengan kapasitas 5 ton yang digunakan menjadi gudang transit untuk produk-produk hasil kelautan dan perikanan maupun produk-produk yang memerlukan penanganan rantai dingin;
 - b) Sosialisasi fasilitas layanan transportasi dengan moda kereta api kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan serta stakeholder lainnya;
- 13) Implementasi Kegiatan Kerja Sama Ditjen PDSPKP dengan BRIN
- a) Penyediaan Instalasi Karantina Ikan untuk pelaku usaha ikan hias;
 - b) Pemanfaatan ruang Raiser 2 dan 3, gedung pengelola dan mushola;
- b. Kerja Sama Bilateral
- 1) Pelaksanaan *Business Matching RI-Singapura* pada tanggal 22 Februari 2023 secara *hybrid*;
 - 2) Menghadiri Pertemuan *Indonesia – Singapore Agribusiness Working Group* (ISAWG) ke-19 tanggal 16 Maret 2023 di Kota Batam;
 - 3) Melaksanakan Rapat Koordinasi Pembahasan Proses Sertifikasi Ekspor Udang Tangkapan Laut ke Amerika Serikat tanggal 8 Maret 2023 di DKI Jakarta;
 - 4) Melaksanakan Pertemuan Audiensi Deputy Chief of Party USAID BERIKAN dengan Ditjen PDSPKP tanggal 1 Maret 2023 di Provinsi DKI Jakarta;
 - 5) Melakukan *Technical expert meeting* isu perikanan dalam kerangka Perundingan Perubahan Protokol IJEPA tanggal 16 – 18 Maret 2023 di Tokyo;
 - 6) Melaksanakan Pertemuan Pembahasan Hibah Proyek *Solar Cold Chains for a Green Economy in Indonesia*/SOCOOL GIZ Jerman tanggal 14 Februari 2023 di Provinsi DKI Jakarta;
 - 7) Menghadiri *Virtual Meeting with Ministry of Climate Change and Environment* (MoCCA) of *Fisheries Uni Emirat Arab*;
 - 8) Melaksanakan Pembahasan Proposal *Cooperation and Capacity Building* (CCB) Indonesia – EFTA CEPA tanggal 4 dan 24 Januari 2023 di DKI Jakarta;

- 9) *Steering Committee Meeting Hibah Smartfish 2* tanggal 30 Maret 2023 di Provinsi DKI Jakarta
- c. Kerja sama Regional dan multilateral
- 1) Menghadiri Rapat Persiapan Rangkaian Pertemuan The 46th SEFADEC PCM 2023;
 - 2) Melaksanakan Pelatihan Pemasaran dan Penyuluhan Keamanan Pangan tanggal 25-27 Januari 2023 di Kabupaten Banyuwangi;
 - 3) Melaksanakan Rapat Penyusunan *Workplan* Hibah FAO FMM SSF tanggal 16-17 Februari 2023 di Yogyakarta;
 - 4) Melaksanakan *Workshop* Peningkatan Partisipasi Perempuan tanggal 6-9 Maret 2023 di Kabupaten Banyuwangi;
 - 5) Menghadiri Rapat Pembahasan Hibah FAO - BOBLME II tanggal 3 Januari 2023 di Provinsi DKI Jakarta;
 - 6) Menghadiri Rapat Virtual Persiapan Rangkaian Pertemuan WTO – *Fish Week* Semester I Tahun 2023 pada tanggal 10 Maret 2023 di Provinsi DKI Jakarta;
 - 7) *Steering Committee Meeting Hibah Smartfish 2* tanggal 30 Maret 2023 di Provinsi DKI Jakarta.

5. Rasio Jumlah Pemberitaan Negatif Bidang PDSPKP terhadap Total Pemberitaan Sektor KP

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kehumasan di Lingkungan KKP, kegiatan kehumasan yang dilaksanakan, dirancang, dan disusun untuk mewujudkan keterbukaan, itikad baik, kerja sama, dan hubungan yang baik dan bermanfaat antara KKP dan pihak lain serta membantu KKP untuk sigap dan responsif terhadap informasi yang beredar yang pada akhirnya akan mewujudkan citra positif KKP.

Pemberitaan tentang Ditjen PDSPKP adalah penyampaian informasi/cerita/keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang berkaitan dengan Ditjen PDSPKP yang dapat mengandung tone/sentimen positif, negatif maupun netral. Jumlah pemberitaan yang negatif merupakan jumlah pemberitaan tentang sektor kelautan dan perikanan yang dimuat di media

massa baik lokal maupun nasional dalam format online, cetak dan audio visual, yang memiliki tone negatif.

Cara penghitungan indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

$$Rasio_{berita} = \frac{Berita_{(-)}}{Total\ Berita_{PDS}} \times 100\%$$

Keterangan :

Rasio_{Berita} = Rasio Jumlah Pemberitaan Negatif Bidang PDSPKP terhadap Total pemberitaan Sektor KP (%)

Berita (-) = Jumlah pemberitaan tentang Ditjen PDSPKP dengan tone/sentimen negatif

Total Berita PDS = Jumlah pemberitaan tentang Ditjen PDSPKP di media massa yang mengandung tone/sentimen positif, negatif maupun netral.

Tabel 8. Ikhtisar Pencapaian Rasio Jumlah Pemberitaan Negatif Bidang PDSPKP terhadap Total Pemberitaan Sektor KP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW I 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW I 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW I 2022-TW I 2023 (%)
	Tahun 2023	TW I 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW I 2023	Tahun 2024		
Rasio Jumlah Pemberitaan Negatif Bidang PDSPKP terhadap Total Pemberitaan Sektor KP (%)	≤5	≤5	-	0	120	120	-	0	0

Selama triwulan I tahun 2023, tidak ada berita bertone negatif tentang Ditjen PDSPKP sehingga angka capaiannya 0%. Capaian ini setara dengan 120% terhadap target tahun 2023 sebesar ≤5% (terhitung otomatis pada Aplikasi Kinerjaku) atau setara dengan 120% terhadap target triwulan I tahun 2023 sebesar ≤5% (terhitung otomatis pada Aplikasi Kinerjaku).

Rasio Jumlah Pemberitaan Negatif Bidang PDSPKP terhadap Total Pemberitaan Sektor KP belum tercantum dalam dokumen Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dan dokumen dimaksud belum bisa direvisi karena penyusunan organisasi KKP masih dalam proses pembahasan, sehingga capaian tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024. Jika dibandingkan dengan capaian TW I Tahun 2022, maka capaian TW I Tahun 2023 tidak mengalami penurunan ataupun peningkatan.

Ditjen PDSPKP telah melakukan beberapa kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian target indikator kinerja ini antara lain :

- a. Membuat siaran pers setiap event Ditjen PDSPKP sehingga media massa tidak ada kesalahpahaman dalam menyusun berita;
- b. Menjalin media relationship yang baik dengan media massa melalui pelayanan informasi dan publikasi yang informatif untuk kegiatan prioritas Ditjen PDSPKP;
- c. Menayangkan berbagai konten informasi dan edukasi tentang Ditjen PDSPKP melalui akun resmi media sosial dan website Ditjen PDSPKP.

Tabel 9. Rekapitulasi Jumlah Pemberitaan Ditjen PDSPKP Berdasarkan Tone Pemberitaan

No	Bulan	Tone Pemberitaan			Jumlah
		Positif	Negatif	Netral	
1	Januari	48	0	4	52
2	Februari	28	0	3	31
3	Maret	37	0	2	39
Jumlah		113	0	9	122

6. Persentase Pemenuhan Dokumen Maturitas SPIP Ditjen PDSPKP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Tabel 10. Ikhtisar Pencapaian Persentase Pemenuhan Dokumen Maturitas SPIP Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW I 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW I 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW I 2022-TW I 2023 (%)
	Tahun 2023	TW I 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW I 2023	Tahun 2024		
Persentase Pemenuhan Dokumen Maturitas SPIP Ditjen PDSPKP (%)	100	-	-	-	-	-	-	-	-

Persentase pemenuhan dokumen maturitas SPIP Ditjen PDSPKP tahun 2023 tercapai sebesar 100%. Indikator kinerja ini bersifat tahunan, sehingga capaiannya belum bisa diketahui pada triwulan I tahun 2023. Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

- a. Pada tanggal 4 Januari 2023 melaksanakan rapat dengan tim SPIP Ditjen PDSPKP dalam rangka membahas penyusunan Laporan SPIP triwulan IV Tahun 2022 dan penyusunan peta risiko serta form manajemen risiko tahun 2022, sesuai undangan Sekretaris Ditjen PDSPKP nomor B.31/DJPDSPKP.0/TU.330/I/2023 tanggal 3 Januari 2023;
- b. Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) atas Pengelolaan Keuangan Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP yang dilaksanakan pada tanggal 20-23 Februari 2023.

7. Indeks Profesionalitas ASN lingkungan Setditjen PDSPKP

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018).

Tabel 11. Ikhtisar Pencapaian Indeks Profesionalitas ASN lingkungan Setditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW I 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW I 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW I 2022-TW I 2023 (%)
	Tahun 2023	TW I 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW I 2023	Tahun 2024		
Indeks Profesionalitas ASN lingkungan Setditjen PDSPKP (Indeks)	83,2	-	76	-	-	-	-	-	

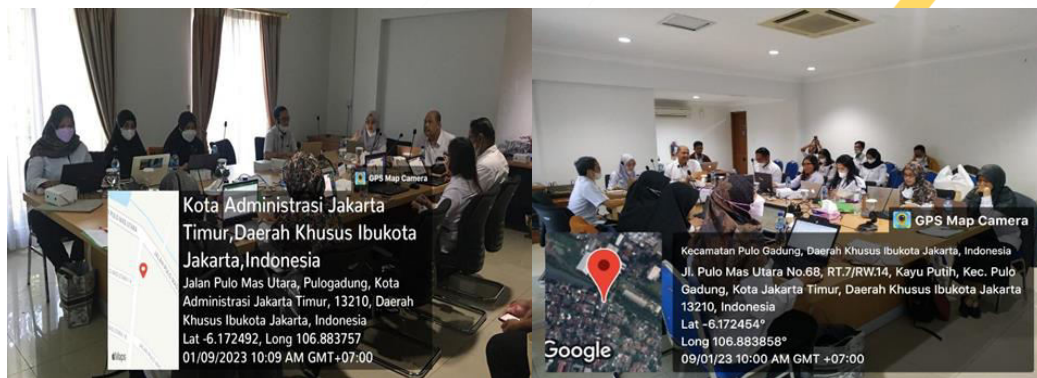
Pada tahun 2023, Indeks Profesionalitas ASN lingkungan Setditjen PDSPKP ditargetkan sebesar 83,2. Indikator kinerja ini bersifat semesteran, sehingga capaiannya belum diperhitungkan pada triwulan I tahun 2023. Capaian bisa diperoleh melalui website <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn#/ip-asn/eselon>.

Selama Bulan Januari s.d. Maret 2023, Setditjen PDSPKP telah melakukan beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja ini antara lain :

- a. Penyusunan Standar Kualitas Hasil Kerja (SKHK) dan Pedoman Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan pada tanggal 18-20 Januari 2023 tanggal 4 Januari 2023;
- b. Rapat persiapan revisi Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 7 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 8 Tahun 2018 tentang Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan pada tanggal 10 Januari 2023 sesuai dengan undangan Sekretariat Direktorat Jenderal PDSPKP Nomor B.128/DJPDSPKP.0/TU.330/I/2023 tanggal 5 Januari 2023;
- c. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat fungsional APHP dan Pembina Mutu tanggal 6 Januari 2023;
- d. Rapat Koordinasi Pengisian Formasi Pegawai Ditjen PDSPKP melalui Aplikasi SSCASN tanggal 2 Januari 2023;
- e. Rapat Pembahasan Permasalahan Tugas Belajar dalam rangka Pengembangan SDM Aparatur tanggal 5 Januari 2023;

- f. Bimbingan Teknis Penilaian Kinerja pada Aplikasi e-Kinerja BKN dalam rangka Pengembangan SDM Aparatur tanggal 9 Januari 2023;
- g. Sosialisasi Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan (APHP) tanggal 12 Januari 2023;
- h. Sosialisasi Jabatan Fungsional Pembina Mutu dan Asisten Pembina Mutu (PM/APM) tanggal 20 Januari 2023;
- i. Rapat Monitoring dan Evaluasi Disiplin Kinerja Pegawai lingkup Ditjen PDSPKP tahun 2022 tanggal 25 Januari 2023;
- j. Rapat Penyusunan Rencana Kebutuhan Pegawai lingkup Ditjen PDSPKP Tahun 2023-2026 dalam rangka Penyusunan Formasi Sumber Daya Manusia Aparatur tanggal 30 Januari 2023;
- k. Kegiatan Penguatan Budaya Kerja ASN Berakhlak lingkup Sekretariat Ditjen PDSPKP tanggal 9 s.d 12 Maret 2023;
- l. Kegiatan Olahraga Bersama di Monas dalam rangka Pembinaan Karakter dan Disiplin SDM Aparatur tanggal 10 Februari 2023;
- m. Pembahasan Bahan Ajar Pelatihan Dasar Jabatan Fungsional APHP & PMHKP dalam rangka Pengembangan Jabatan Fungsional Binaan Ditjen PDSPKP tanggal 10 Februari 2023;
- n. Sosialisasi Jabatan Fungsional Perekayasa dalam rangka Pengembangan SDM Aparatur tanggal 14 Februari 2023;
- o. Kegiatan dalam rangka Pengembangan Jabatan Fungsional Binaan Ditjen PDSPKP tanggal 17 Februari 2023;
- p. Kegiatan uji kompetensi JF PMHKP dalam rangka pengembangan jabatan fungsional binaan PDSPKP tanggal 21 Februari 2023;
- q. Pelantikan Jabatan Fungsional dan Sumpah Pegawai APK APBN tanggal 28 Februari 2023;
- r. Rapat Penyusunan Rencana Kebutuhan Pegawai Lingkup Ditjen PDSPKP Tahun 2023 - 2024 dalam rangka Penyusunan Formasi Pegawai tanggal 1 Maret 2023;
- s. Rapat Penyusunan Data Analisis Potensi dan Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural tanggal 13 dan 31 Maret 2023;
- t. Kegiatan Penguatan Budaya Kerja ASN Berakhlak tanggal 9 s.d 12 Maret 2023;

u. Rapat Pembahasan Standar Kualitas Hasil Kerja APHP tanggal 29 Maret 2023.



Gambar 7. Bimbingan Teknis Penilaian Kinerja pada Aplikasi e-Kinerja BKN dalam rangka Pengembangan SDM Aparatur



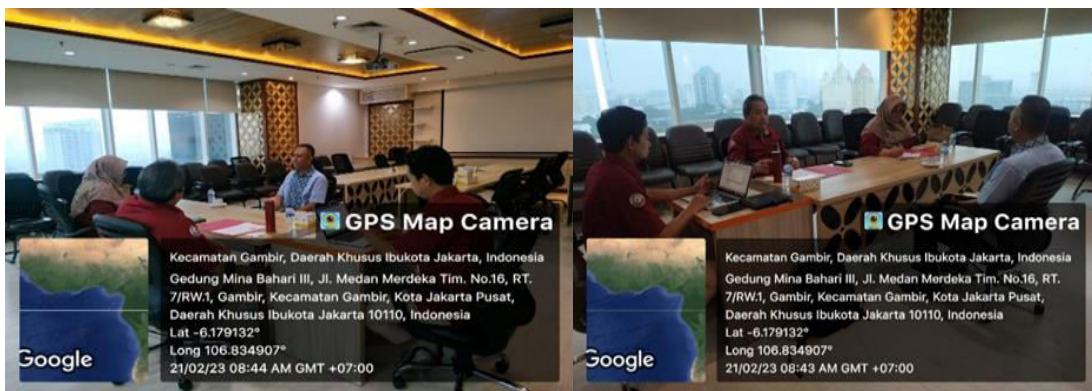
Gambar 8. Rapat Monitoring dan Evaluasi Disiplin Kinerja Pegawai lingkup Ditjen PDSPKP tahun 2022



Gambar 9. Pembahasan Bahan Ajar Pelatihan Dasar Jabatan Fungsional APHP dan PM HKP dalam rangka Pengembangan Jabatan Fungsional Binaan Ditjen PDSPKP



Gambar 10. Kegiatan dalam rangka Pengembangan Jabatan Fungsional Binaan Ditjen PDSPKP



Gambar 11. Kegiatan Uji Kompetensi JF PM HKP dalam rangka Pengembangan JF binaan PDSPKP



Gambar 12. Pelantikan JF dan Sumpah Pegawai APK APBN



Gambar 13. Rapat Pembahasan Standar Kualitas Hasil Kerja APHP tanggal 29 Maret 2023

8. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan Setditjen PDSPKP

SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Nilai PMSAKIP merupakan penilaian mandiri oleh Itjen KKP terhadap penerapan SAKIP pada instansi pemerintah yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada penerapan outcome dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Tabel 12. Ikhtisar Pencapaian Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW I 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW I 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW I 2022-TW I 2023 (%)
	Tahun 2023	TW I 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW I 2023	Tahun 2024		
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	80,5	-	84,75	-	-	-	-	-	

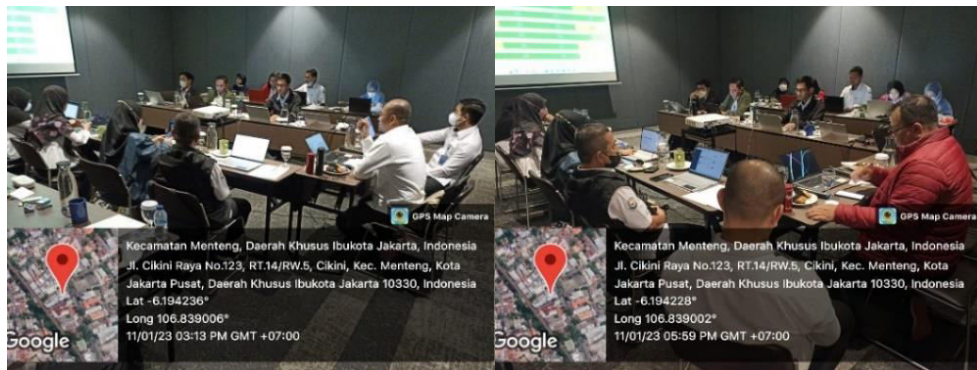
Pada tahun 2023, nilai PMSAKIP Ditjen PDSPKP ditargetkan sebesar 80,5. Indikator kinerja ini bersifat tahunan sehingga belum dinilai di triwulan I tahun 2023. Penilaian atas PMSAKIP Ditjen PDSPKP akan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KKP atau mandiri jika tidak ada penilaian dari Inspektorat Jenderal KKP.

Ditjen PDSPKP telah melakukan beberapa kegiatan guna mendukung pencapaian target indikator kinerja ini antara lain:

- a. Mengesahkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 74 Tahun 2023 tentang Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan; dengan tanggal pengesahan 11 April 2023;
- b. Menyusun draft Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Indikator Kinerja lingkup Ditjen PDSPKP Tahun 2023;
- c. Menyusun perjanjian kinerja, manual indikator kinerja, rincian target indikator kinerja, rencana aksi atas perjanjian kinerja, pohon kinerja, dan matriks cascading lingkup Ditjen PDSPKP Tahun 2023;
- d. Menyelenggarakan Dialog Kinerja Organisasi Ditjen PDSPKP Tahun 2023 pada tanggal 6 Januari 2023 bertempat di RR. Mutiara, GMB III Lantai 14 KKP;
- e. Kegiatan pengukuran kinerja, verifikasi data capaian kinerja, penyusunan laporan kinerja, dan penyusunan evaluasi rencana aksi dilakukan secara berkala triwulanan. Kegiatan-kegiatan dimaksud telah dilakukan dengan melibatkan pejabat eselon II (Sesditjen PDSPKP) karena akan mempengaruhi penilaian pada aspek pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PMSAKIP dalam hal keterlibatan pimpinan;
- f. Penyampaian laporan kinerja yang sudah disahkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Eselon I lingkup KKP, serta stakeholders terkait secara tepat waktu yakni paling lambat 1 bulan setelah periode pelaporan triwulanan berakhir yang dibuktikan dengan surat resmi. Penyampaian laporan kinerja secara tepat waktu akan meningkatkan penilaian pada aspek pelaporan pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PMSAKIP;
- g. Kegiatan penyusunan laporan evaluasi program/kegiatan Ditjen PDSPKP Tahun 2022 pada tanggal 9 Februari 2023 di RR. Rustami, Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar Sempur, Bogor;
- h. Kegiatan Evaluasi Program Kegiatan Periode Januari s.d Februari Tahun 2023 pada tanggal 7 Maret 2023 bertempat di RR. Karajinan GMB III Lantai 14 KKP.



Gambar 14. Dialog Kinerja Organisasi Ditjen PDSPKP Tahun 2023



Gambar 15. Kegiatan pengukuran kinerja, verifikasi capaian kinerja, dan evaluasi rencana aksi lingkup Ditjen PDSPKP Periode Triwulan IV Tahun 2022 pada Tanggal 2 Januari 2023



Gambar 16. Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja lingkup Ditjen PDSPKP Periode Triwulan IV Tahun 2023 pada Tanggal 18-20 Januari 2023

9. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI lingkungan Sekretariat Ditjen PDSPKP

Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI lingkungan Sekretariat Ditjen PDSPKP merupakan jumlah nilai temuan keuangan terbatas pada nilai tuntutan ganti rugi Unit Eselon II atas hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Sekretariat Ditjen PDSPKP Tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi anggaran Sekretariat Ditjen PDSPKP Tahun 2022.

Tabel 13. Ikhtisar Pencapaian Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI lingkungan Sekretariat Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW I 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW I 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW I 2022-TW I 2023 (%)
	Tahun 2023	TW I 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW I 2023	Tahun 2024		
Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI lingkungan Sekretariat Ditjen PDSPKP (%)	≤0,5	-	≤1	-	-	-	-	-	-

Pada tahun 2023, Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI lingkungan Sekretariat Ditjen PDSPKP ditargetkan sebesar ≤0,5%. Sampai dengan triwulan I tahun 2023 belum ada surat resmi terkait nilai temuan LHP BPK atas LK Ditjen PDSPKP Tahun 2022 sehingga capaiannya belum bisa dihitung.

Sekretariat Ditjen PDSPKP telah melakukan beberapa kegiatan guna mendukung pencapaian target indikator kinerja ini antara lain :

- a. Melakukan pendampingan pemeriksaan BPK di Kota Kupang pada tanggal 10 Februari 2023 atas pembangunan pabrik es yang dibangun Direktorat Logistik bersama tim teknis dari pelaksana konstruksi dan konsultan pengawas;
- b. Mengadakan rapat pembahasan hasil pemeriksaan BPK di Kota Kupang pada tanggal 15 Maret 2023 dengan tim teknis dari pelaksana konstruksi dan konsultan pengawas.

10. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan Setditjen PDSPKP

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Setditjen PDSP didefinisikan sebagai jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik berdasarkan surat maupun bab) yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2022 s.d Triwulan III Tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti oleh seluruh mitra kerja yang menjadi objek pengawasan.

Pengukuran indikator kinerja ini dilakukan oleh Itjen KKP atau dapat dilihat pada Aplikasi SIDAK dengan periode perhitungan triwulanan. Penghitungan indikator kinerja ini dengan menggunakan rumus :

$$\%RP = \frac{\sum Nt}{\sum N} \times 100\%$$

Keterangan :

%RP : Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Setditjen PDSPKP

$\sum Nt$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh Sekretariat Ditjen PDSPKP

$\sum N$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada Sekretariat Ditjen PDSPKP

Tabel 14. Ikhtisar Pencapaian Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan Setditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW I 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW I 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW I 2022-TW I 2023 (%)
	Tahun 2023	TW I 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW I 2023	Tahun 2024		
Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan Setditjen PDSPKP (%)	75	75	80	96,58	128,77	128,77	120,73	97,34	-0,78

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Setditjen PDSPKP triwulan I tahun 2023 adalah sebesar 96,58%. Capaian ini setara dengan 128,77% terhadap target triwulan I tahun 2023 yaitu 75% atau secara otomatis terhitung 120% pada

Aplikasi Kinerjaku. Jika dibandingkan capaian triwulan I tahun 2022 sebesar 97,34%, maka capaian triwulan I tahun 2023 turun sebesar 0,78%. Jika dibandingkan target jangka menengah tahun 2024 sebesar 80%, maka capaian ini setara dengan 120,73%.

Beberapa upaya dalam rangka mencapai target indikator kinerja persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Setditjen PDSPKP antara lain:

- a. Pada tanggal 8 Maret 2023 dilakukan pembahasan atas hasil pemeriksaan Itjen baik berupa audit, reviu, evaluasi maupun pemantauan yang dihadiri oleh perwakilan unit kerja eselon II lingkup Ditjen PDSPKP dan Inspektorat Jenderal. Sebelum dilakukan pembahasan, capaian tindak lanjut unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP per tanggal 6 Maret 2023 adalah sebesar 96,88% dengan jumlah rekomendasi berstatus proses sebanyak 17 dan pending 18. Pada saat pembahasan dengan Inspektorat Jenderal, masing-masing pemilik kegiatan dari unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP menyampaikan dokumen tindak lanjut sehingga beberapa rekomendasi sudah dinyatakan tuntas sehingga realisasi naik menjadi 98,21% dengan jumlah rekomendasi berstatus proses sebanyak 19 dan pending 1.
- b. Pada tanggal 31 Maret 2023 dilakukan pembahasan atas hasil pemeriksaan Itjen untuk periode sampai dengan triwulan I 2023. Capaian tindak lanjut unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP sebesar 98,33% dengan jumlah rekomendasi berstatus proses sebanyak 15 dan pending 4.

11. Persentase Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Ditjen PDSPKP yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.

Tabel 15. Ikhtisar Pencapaian Persentase Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Ditjen PDSPKP yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW I 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW I 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW I 2022-TW I 2023 (%)
	Tahun 2023	TW I 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW I 2023	Tahun 2024		
Persentase Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Ditjen PDSPKP yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)	92	92	86	100	108,70	108,70	116,28	100	0

Persentase Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Ditjen PDSPKP yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar triwulan I tahun 2023 adalah sebesar 100%. Capaian ini setara dengan 108,7% terhadap target tahun 2023 yakni 92% atau 108,7% terhadap target triwulan I tahun 2023 yakni 92%. Jika dibandingkan target jangka menengah tahun 2024 yakni 86, maka capaian triwulan I tahun 2023 setara dengan 116,28%.

Sekretariat Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa upaya dalam rangka mencapai target indikator kinerja ini antara lain:

- a. Pengumpulan data user (email) untuk pembuatan user aplikasi manajemen pengetahuan (bitrix24) bagi yang belum memiliki sekaligus melakukan pembaharuan nama pegawai dalam struktur organisasi;
- b. Optimalisasi penggunaan aplikasi manajemen pengetahuan (bitrix24) melalui: a) Penyimpanan dokumen secara online, b) Polling dan penyampaian penghargaan, c) Sirkulasi Undangan/Pengumuman secara online, d) Data umum pegawai berdasarkan struktur organisasi, e) Jadwal dan hasil kegiatan, f) Disposisi, dan g) Percakapan dan komunikasi.
- c. Setiap menjelang akhir triwulan, dilakukan *warning system* kepada pejabat eselon 2, koordinator kelompok dan sub koordinator terhadap keaktifannya dalam menggunakan aplikasi bitrix24 sebagai alat penilaian IKU.

12. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Setditjen PDSPKP

Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Indikator kinerja ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L.

Tabel 16. Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Setditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW I 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW I 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW I 2022-TW I 2023 (%)
	Tahun 2023	TW I 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW I 2023	Tahun 2024		
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Setditjen PDSPKP (Nilai)	89	-	90	-	-	-	-	-	-

Pada tahun 2023, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di Lingkungan Setditjen PDSPKP ditargetkan sebesar 89 (Baik). Indikator kinerja ini bersifat semesteran sehingga capaiannya belum dihitung pada triwulan I tahun 2023. Capaian akan diperoleh melalui Aplikasi OMSPAN Kemenkeu.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Ditjen PDSPKP telah melaksanakan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) atas Pengelolaan Keuangan Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP yang dilaksanakan pada tanggal 20-23 Februari 2023. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari unit kerja eselon II lingkup Ditjen PDSPKP dengan narasumber dari Kementerian Keuangan dan Biro Keuangan KKP. Sosialisasi dibuka oleh Sesditjen PDSPKP. Beliau menyampaikan pentingnya SPI dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, disampaikan juga pentingnya pengendalian atas pengelolaan PBJ. Narasumber dari Direktorat Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharaan Kementerian

Keuangan menyampaikan materi terkait sosialisasi pelaksanaan anggaran. Beliau menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- Capaian IKPA KKP pada setiap triwulannya selalu lebih rendah dibandingkan capaian IKPA secara nasional;
- Indikator yang perlu di evaluasi dan menjadi fokus perbaikan kedepan adalah deviasi halaman III DIPA karena memiliki capaian yang lebih rendah dibandingkan target nasional sebesar 89 serta Indikator kinerja belanja kontraktual dan pengelolaan UP TUP yang masih belum mencapai kategori sangat baik;
- Ketentuan umum indikator kinerja deviasi halaman III DIPA yaitu deviasi dihitung pada masing-masing jenis belanja, ambang batas rata-rata deviasi bulanan sebesar 5,0% untuk memperoleh nilai maksimal (100), batas maksimal deviasi per jenis belanja tiap bulannya sebesar 100%;
- Strategi optimalisasi indikator kinerja deviasi halaman III DIPA yaitu mereviu rencana kegiatan secara periodik dan prognosis penyerapan anggaran (minimal sekali di akhir triwulan), serta menyusun rencana penarikan dana masing-masing jenis belanja, menyelaraskan RPD Halaman III DIPA dengan target penyerapan anggaran triwulanan (dalam hal terdapat perubahan komposisi pagu per jenis belanja, agar memperhatikan perubahan target penyerapan anggaran dan melakukan penyesuaian pada RPD Hal III DIPA), mengajukan revisi Hal III DIPA sebelum batas akhir cut off RPD triwulanan dalam rangka penilaian IKPA, melakukan pengendalian pencairan anggaran sesuai RPD.

13. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) di Lingkungan Sekretariat Ditjen PDSPKP

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yg dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Nilai ini diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan setiap Satuan Kerja lingkup KKP kedalam aplikasi SMART Kemenkeu.

Aplikasi SMART DJA Kemenkeu telah dibangun dan efektif digunakan sejak tahun anggaran 2012 untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja

atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Aplikasi SMART DJA Kemenkeu yang mengacu pada PMK tersebut adalah melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja atas Aspek Implementasi. Namun, seiring dengan penyempurnaan sistem pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, aplikasi SMART DJA Kemenkeu juga telah disempurnakan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja anggaran

Tabel 17. Ikhtisar Pencapaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) di Lingkungan Sekretariat Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW I 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW I 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW I 2022-TW I 2023 (%)
	Tahun 2023	TW I 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW I 2023	Tahun 2024		
Nilai Kinerja Anggaran (NKA) di Lingkungan Sekretariat Ditjen PDSPKP (Nilai)	86	-	89	-	-	-	-	-	-

Pada tahun 2023, Nilai Kinerja Anggaran (NKA) di Lingkungan Sekretariat Ditjen PDSPKP ditargetkan sebesar 86 (Baik). Indikator kinerja ini bersifat tahunan sehingga capaiannya belum dihitung pada triwulan I tahun 2023. Capaian akan diperoleh melalui Aplikasi SMART DJA Kemenkeu.

14. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Ditjen PDSPKP

Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Ditjen PDSPKP merupakan suatu ukuran yang menggambarkan efektivitas kinerja pengawasan intern KKP dalam mengawal dan memastikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa lingkup KKP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 18. Ikhtisar Pencapaian Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW I 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW I 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW I 2022-TW I 2023 (%)
	Tahun 2023	TW I 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW I 2023	Tahun 2024		
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Ditjen PDSPKP (%)	77,5	-	80						

Pada tahun 2023, tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Ditjen PDSPKP ditargetkan sebesar 77,5%. Indikator kinerja ini bersifat tahunan. Pengukuran indikator kinerja ini akan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KKP dan hasil penilaiannya akan didapatkan setelah berakhirnya tahun anggaran 2023.

Setditjen PDSPKP telah melakukan beberapa kegiatan guna mendukung pencapaian target indikator kinerja ini antara lain :

- a. Melakukan penginputan rencana umum pengadaan (RUP) ke dalam aplikasi SIRUP melalui LPSE KKP, yaitu: (1) seluruh paket pengadaan melalui Penyedia pada Satker Pusat telah diumumkan dalam SIRUP baik yang swakelola maupun penyedia yang dilaksanakan melalui e-purchasing, tender, dan pengadaan langsung; dan (2) melakukan revisi RUP pengadaan dikarenakan adanya perbaikan paket dan telah diumumkan ulang di aplikasi SIRUP melalui LPSE KKP;
- b. Melaksanakan kegiatan pemantauan penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP tanggal 15 s.d 17 Maret 2023 di Raiser Ikan Hias Cibinong. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh unit kerja dilingkungan Direktorat Jenderal PDSPKP dan Tim Inspektorat IV – Itjen KKP. Selain itu pada tanggal yang sama juga dilakukan pemantauan peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) dilingkungan Direktorat Jenderal PDSPKP.

15. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Setditjen PDSPKP

Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN lingkup Setditjen PDSPKP merupakan suatu ukuran yang menggambarkan efektivitas kualitas kinerja pengawasan intern Ditjen PDSPKP dalam mengawal dan memastikan pengelolaan BMN di lingkungan Ditjen PDSPKP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Setditjen PDSPKP diukur melalui pemenuhan beberapa indikator berikut :

- Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2023;
- Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST sampai dengan triwulan III tahun 2023 baik ke pengguna barang dan pengelola barang;
- Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2023;
- Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2022 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian;
- Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu.

Tabel 19. Ikhtisar Pencapaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Setditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW I 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW I 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW I 2022-TW I 2023 (%)
	Tahun 2023	TW I 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW I 2023	Tahun 2024		
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Setditjen PDSPKP (%)	77,5	-	-	-	-	-	-	-	-

Pada tahun 2023, tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Setditjen PDSPKP ditargetkan sebesar 77,5%. Indikator kinerja ini bersifat tahunan. Pengukuran indikator kinerja ini akan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KKP dan hasil penilaiannya akan didapatkan setelah berakhirnya tahun anggaran 2023. Indikator kinerja ini belum tercantum dalam dokumen Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dan dokumen dimaksud belum bisa direvisi karena

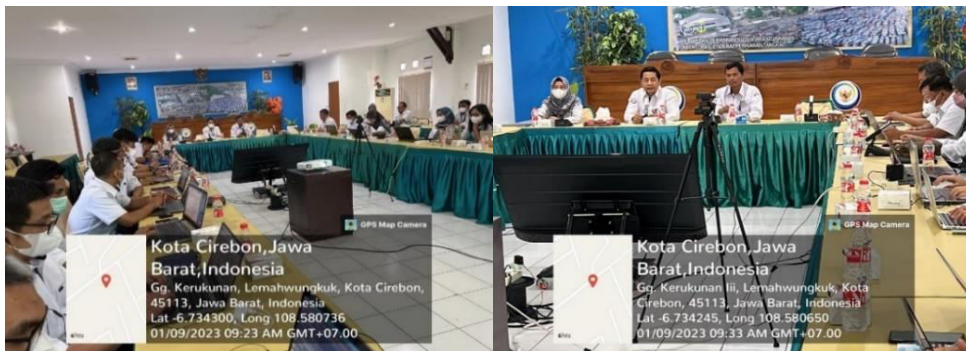
penyusunan organisasi KKP masih dalam proses pembahasan, sehingga capaian tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024.

Setditjen PDSPKP telah melakukan beberapa kegiatan guna mendukung pencapaian target indikator kinerja ini antara lain :

- a. Mengadakan pertemuan dalam rangka persiapan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2022. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 9 s/d 11 Januari 2023 di Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Cirebon dan diikuti oleh Para Subkoordinator Tata Usaha, Operator SAKTI Modul Komitmen, Operator SAKTI Modul Persediaan dan Aset Tetap, serta Tim Reviu dari Inspektorat IV Itjen KKP dan Biro Keuangan KKP;
- b. Melakukan pendampingan uji petik Tim Inspektorat IV - Itjen KKP dalam rangka Evaluasi Pemanfaatan BMN berupa kendaraan berpendingin dan kendaraan bermotor pick up tahun 2022-2023 di Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara, serta Kota Denpasar Provinsi Bali pada tanggal 20 s/d 22 Februari 2023. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran sesungguhnya atas pemanfaatan kendaraan berpendingin oleh PT Perikanan Indonesia;
- c. Mengadakan pertemuan dalam rangka pembahasan usulan perubahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Direktorat Jenderal PDSPKP Tahun 2023 pada tanggal 07 Maret 2023 di Raiser Ikan Hias Cibinong Bogor Jawa Barat. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh unit kerja eselon 2 dilingkungan Direktorat Jenderal PDSPKP, serta Tim Reviu dari Inspektorat IV Itjen KKP. Tujuan kegiatan ini adalah untuk membahas usulan rencana pengadaan kendaraan jabatan tahun anggaran 2023 dilingkungan Ditjen PDSPKP melalui mekanisme perubahan RKBMN Tahun 2023. Output yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah usulan perubahan RKBMN tahun 2023 Direktorat jenderal PDSPKP;
- d. Melakukan pendampingan pemeriksaan fisik Kapal Jananuraga bersama Tim Kementerian Sekretariat Negara RI di Dermaga CT-3 BPKS Sabang pada tanggal 16 s/d 18 Maret 2023. Kegiatan ini juga diikuti oleh perwakilan dari Biro Keuangan KKP dan Inspektorat IV Itjen KKP. Pemeriksaan fisik Kapal Jananuraga dilakukan oleh Tim Kementerian Sekretariat Negara

dilaksanakan dalam rangka persetujuan penghapusan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan kepada Presiden RI;

- e. Mengajukan usulan penetapan status penggunaan barang milik negara (BMN) kepada: (1) Biro Keuangan KKP atas BMN berupa peralatan dan mesin senilai total Rp.1.763.540.943,00 sebagaimana surat Nomor B.1338/DJPDSPKP.0/PL.710/II/2023 tanggal 28 Februari 2023, dan (2) KPKNL Jakarta II atas BMN berupa peralatan dan mesin senilai total Rp.2.039.504.000,00 sebagaimana surat Nomor B.1902/DJPDSPKP.0/PL.710 /III/2023 tanggal 29 Maret 2023.



Gambar 17. Persiapan Penyusunan Laporan BMN Tahun 2022



Gambar 18. Uji Petik Evaluasi Pemanfaatan BMN



Gambar 19. Cek Fisik BMN di Bena dan Bitung



Gambar 20. Pembahasan Usulan Perubahan RKBMN Tahun 2023



Gambar 21. Pendampingan Pemeriksaan Fisik Kapal Jananuraga

16. Persentase Lembar Kerja Data Produksi yang Tervalidasi Setditjen PDSPKP

Persentase Data Produksi Kelautan dan Perikanan yang Tervalidasi, merupakan penilaian atas capaian realisasi pendataan produksi terhadap sampling yang telah ditetapkan pada tahun berjalan serta capaian atas validasi nasional pada aplikasi validasi nasional desktop dalam ruang lingkup pendataan produksi kelautan dan perikanan.

Tabel 20. Ikhtisar Pencapaian Persentase Lembar Kerja Data Produksi yang Tervalidasi Setditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW I 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW I 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW I 2022-TW I 2023 (%)
	Tahun 2023	TW I 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW I 2023	Tahun 2024		
Persentase Lembar Kerja Data Produksi yang Tervalidasi Setditjen PDSPKP (%)	100	-	-	-	-	-	-	-	-

Pada tahun 2023, persentase lembar kerja data produksi yang tervalidasi Setditjen PDSPKP ditargetkan sebesar 100%. Indikator kinerja ini bersifat tahunan. Pengukuran capaian indikator kinerja ini akan dilakukan oleh Pusdatin dan hasil penilaiannya akan didapatkan setelah berakhirnya tahun anggaran 2023.

Persentase lembar kerja data produksi yang tervalidasi Setditjen PDSPKP merupakan indikator kinerja ini baru pada tahun 2023 sehingga capaiannya tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Selain itu, indikator kinerja ini belum tercantum dalam dokumen Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dan dokumen dimaksud belum bisa direvisi karena penyusunan organisasi KKP masih dalam proses pembahasan, sehingga capaian tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024.

Setditjen PDSPKP telah melakukan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini antara lain :

- a. Percepatan validasi data bidang PDSPKP bertempat di Jakarta pada tanggal 18-20 Januari 2023
- b. Menghadiri kegiatan percepatan validasi data bidang PDSPKP tahun 2022 di beberapa Provinsi, seperti:
 - Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 13 Maret 2023;
 - Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 13 Maret 2023;
 - Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 17 Maret 2023;
 - Provinsi Lampung pada tanggal 21 Maret 2023;
 - Provinsi Jawa Barat pada tanggal 22 Februari 2023;
 - Provinsi DIY pada tanggal 21 Maret 2023.



Gambar 22. Kegiatan Percepatan Validasi Data Bidang PDSPKP Tahun 2022 di Beberapa Provinsi

Sasaran Kegiatan 2.

Terwujudnya Layanan Sarana dan Prasarana Internal lingkup Ditjen PDSPKP yang Efisien, Efektif, dan Berorientasi pada Layanan Prima

17. Persentase Pemenuhan Layanan Internal/Overhead lingkup Ditjen PDSPKP

Pemenuhan layanan internal/overhead lingkup Ditjen PDSPKP merupakan layanan perkantoran yang berupa pengadaan sarana dan prasarana guna mendukung operasional perkantoran lingkup Ditjen PDSPKP. Kegiatan ini berupa pengadaan sarana internal alat pengolah data serta sarana internal meubelair dan barang modal lainnya.

Tabel 21. Ikhtisar Pencapaian Persentase Pemenuhan Layanan Internal/Overhead lingkup Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW I 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW I 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW I 2022-TW I 2023 (%)
	Tahun 2023	TW I 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW I 2023	Tahun 2024		
Persentase Pemenuhan Layanan Internal/Overhead lingkup Ditjen PDSPKP (%)	100	100	-	100	100	100	-	-	-

Persentase Pemenuhan Layanan Internal/Overhead lingkup Ditjen PDSPKP triwulan I tahun 2023 tercapai sebesar 100%. Capaian ini setara dengan 100% terhadap target tahun 2023 atau 100% terhadap target triwulan I tahun 2023. Capaian indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian periode yang sama di tahun sebelumnya karena pada tahun 2022, indikator kinerja ini sifatnya tahunan. Indikator kinerja ini belum tercantum dalam dokumen Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dan dokumen dimaksud belum bisa direvisi karena penyusunan organisasi KKP masih dalam proses pembahasan, sehingga capaian tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024.

Sasaran Kegiatan 3.

Terwujudnya Pelaksanaan Layanan Perkantoran lingkup Ditjen PDSPKP yang Efisien, Efektif, dan Berorientasi pada Layanan Prima

18. Jumlah Pemenuhan Layanan Perkantoran lingkup Ditjen PDSPKP

Pemenuhan layanan perkantoran merupakan kegiatan layanan operasional perkantoran yang berupa terselenggaranya gaji dan tunjangan untuk pembayaran belanja pegawai serta operasional dan pemeliharaan kantor di lingkungan Direktorat Jenderal PDSPKP.

Tabel 22. Ikhtisar Pencapaian Jumlah Pemenuhan Layanan Perkantoran lingkup Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW I 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW I 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW I 2022-TW I 2023 (%)
	Tahun 2023	TW I 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW I 2023	Tahun 2024		
Jumlah Pemenuhan Layanan Perkantoran lingkup Ditjen PDSPKP (Bulan)	12	3	-	3	25	100			

Persentase Pemenuhan Layanan Perkantoran lingkup Ditjen PDSPKP triwulan I tahun 2023 tercapai sebanyak 3 bulan. Capaian ini setara dengan 100% terhadap target tahun 2022. Indikator kinerja ini belum tercantum dalam dokumen Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dan dokumen dimaksud belum bisa direvisi karena penyusunan organisasi KKP masih dalam proses pembahasan, sehingga capaian tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024.

Ditjen PDSPKP telah melakukan beberapa kegiatan guna mendukung pencapaian target indikator kinerja ini antara lain:

- Pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) selama bulan Januari sampai dengan Maret 2023 dengan tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku;
- Pembayaran honor Pegawai Negeri Non ASN selama bulan Januari sampai dengan Maret 2023 dengan tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku;

- c. Pembayaran honorarium pejabat pengelola perbendaharaan di lingkungan Ditjen PDSPKP dari Bulan Januari sampai dengan Maret 2023 sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran Sekretariat Ditjen PDSPKP, seperti pembayaran telepon, belanja sewa tanaman, pemeliharaan dan eksploitasi kendaraan pejabat dan operasional, belanja keperluan perkantoran dan sehari-hari;
- e. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran di lingkungan Satker Direktorat Usaha dan Investasi;
- f. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran di lingkungan Satker Direktorat Logistik;
- g. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran di lingkungan Satker Direktorat Logistik;
- h. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran di lingkungan Satker Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu;
- i. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran di lingkungan Satker Direktorat Pemasaran;
- j. Penyelenggaraan pemeliharaan dan operasional Pasar Ikan Modern di Muara Baru Jakarta;
- k. Penyelenggaraan pemeliharaan dan operasional *Cold Storage* 1000 Ton di Muara Baru Jakarta;
- l. Penyelenggaraan pemeliharaan Kapal Jananuraga yang berada di Sabang, Aceh.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini, Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 62.499.318.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp12.289.613.063,- (19,66%) sampai dengan triwulan I Tahun 2023.

C. Realisasi Anggaran

Pelaksanaan anggaran, harus dikelola dengan optimal sesuai rencana yang telah ditetapkan dan harus dapat dipertanggungjawabkan. Pada Triwulan I Tahun 2023, anggaran pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan yang dikelola oleh Sekretariat Ditjen PDSPKP sebesar Rp138.080.000.000,- (seratus tiga puluh delapan miliar delapan puluh juta rupiah) yang merupakan APBN rupiah murni. Setelah adanya *Auto Adjustment* pada anggaran Setditjen PDSPKP sebesar Rp21.143.215.000,- (dua puluh satu miliar seratus empat puluh tiga juta dua ratus lima belas ribu rupiah) maka total pagu anggaran yang dikelola Sekretariat Ditjen PDSPKP menjadi Rp116.936.785.000,- (seratus enam belas miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Penyerapan anggaran Sekretariat Ditjen PDSPKP sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 adalah sebesar Rp18.972.896.979,- (delapan belas miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah). Realisasi anggaran ini setara dengan 13,74% terhadap pagu anggaran awal atau 16,22 terhadap pagu anggaran pasca AA. Tidak ada permasalahan yang signifikan dalam penyerapan anggaran triwulan I tahun 2023.

Tabel 23. Realisasi Anggaran Sekretariat Ditjen PDSPKP Triwulan I Tahun 2023 Berdasarkan Jenis Belanja

Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi thd Pagu (%)
Belanja Pegawai	60,500,000,000.00	9,691,094,342.00	16,02
Belanja Barang	73,138,200,000.00	8,464,802,637.00	11,57
Belanja Modal	4,441,800,000.00	817,000,000.00	18,39
Total	138,080,000,000.00	18,972,896,979.00	13,74

Sumber : Omspan Kemenkeu, tanggal 14 April 2023

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Ditjen PDSPKP Triwulan I Tahun 2023 ini menyajikan berbagai keberhasilan dan kegagalan capaian sasaran program yang telah ditetapkan selama periode Bulan Januari sampai dengan Maret tahun 2023 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian indikator kinerja. Secara umum, capaian sasaran program Sekretariat Ditjen PDSPKP telah tercapai dengan baik ditunjukkan dengan NKO >100%.

Meskipun demikian, upaya perbaikan peningkatan kinerja tetap akan dilakukan secara berkelanjutan oleh seluruh jajaran Sekretariat Ditjen PDSPKP antara lain melalui perencanaan dan penganggaran yang baik, ketatalaksanaan yang efisien, pengembangan dan pembinaan SDM yang profesional, peningkatan akuntabilitas, penerapan budaya kerja yang baik dan pelaporan yang tertib, sehingga pada akhirnya mampu mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.





**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3500132
LAMAN www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT DITJEN PDSPKP**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Machmud**
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **Ishartini**
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2023

**Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Penguatan
Daya Saing Produk Kelautan dan
Perikanan**

Ishartini

**Pihak Pertama,
Sekretaris Direktorat
Jenderal Penguatan Daya
Saing Produk Kelautan dan
Perikanan**

Machmud

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT DITJEN PDSPKP**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	
1	Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di Lingkungan Ditjen PDSPKP	1	Nilai PMPRB Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	33,5
		2	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang – Undangan di lingkungan Ditjen PDSPKP (%)	100
		3	Nilai Pengawasan Kearsipan di Lingkungan Ditjen PDSPKP (Nilai)	75
		4	Persentase dokumen Kerjasama yang disusun/ditindalanjuti oleh Ditjen PDSPKP (%)	80
		5	Rasio jumlah pemberitaan negatif bidang PDSPKP terhadap total pemberitaan sektor KP (%)	≤5
		6	Persentase pemenuhan dokumen Maturitas SPIP Ditjen PDSPKP (%)	100
		7	Indeks Profesionalitas ASN Lingkungan Setditjen PDSPKP (Indeks)	83,2
		8	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Setditjen PDSPKP (Nilai)	80,5
		9	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Lingkungan Sekretariat Ditjen PDSPKP (%)	≤0,5
		10	Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di Lingkungan Setditjen PDSPKP (%)	75
		11	Persentase Unit kerja di Lingkungan Sekretariat Ditjen PDSPKP yang menerapkan manajemen pengetahuan terstandar (%)	92

		12	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Setditjen PDSPKP (Nilai)	89
		13	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) di Lingkungan Sekretariat Ditjen PDSPKP (Nilai)	86
		14	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Ditjen PDSPKP (%)	77,5
		15	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Setditjen PDSPKP (%)	77,5
		16	Persentase Lembar Kerja Data Produksi yang Tervalidasi Setditjen PDSPKP (%)	100
2	Terwujudnya Layanan Sarana dan Prasarana Internal lingkup Ditjen PDSPKP yang efisien, efektif dan berorientasi pada layanan prima	17	Persentase pemenuhan layanan internal/ <i>overhead</i> lingkup Ditjen PDSPKP (%)	100
3	Terwujudnya pelaksanaan layanan Perkantoran lingkup Ditjen PDSPKP yang efisien, efektif dan berorientasi pada layanan prima	18	Jumlah pemenuhan layanan perkantoran lingkup Ditjen DJPDSPKP (Bulan)	12

DATA ANGGARAN

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	95.861.679.000
Total Anggaran Sekretariat Ditjen PDSPKP Tahun 2023		95.861.679.000

Jakarta, Januari 2023

**Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Penguatan
Daya Saing Produk Kelautan dan
Perikanan**



Ishartini

**Pihak Pertama,
Sekretaris Direktorat
Jenderal Penguatan Daya
Saing Produk Kelautan dan
Perikanan**



Machmud



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3500132
LAMAN www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT DITJEN PDSPKP

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Machmud**
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **Ishartini**
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Penguatan
Daya Saing Produk Kelautan dan
Perikanan

Ishartini

Pihak Pertama,
Sekretaris Direktorat
Jenderal Penguatan Daya
Saing Produk Kelautan dan
Perikanan

Machmud

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT DITJEN PDSPKP**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	
1	Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di Lingkungan Ditjen PDSPKP	1	Nilai PMPRB Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	33,5
		2	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang – Undangan di lingkungan Ditjen PDSPKP (%)	100
		3	Nilai Pengawasan Kearsipan di Lingkungan Ditjen PDSPKP (Nilai)	75
		4	Persentase dokumen Kerjasama yang disusun/ditindalanjuti oleh Ditjen PDSPKP (%)	80
		5	Rasio jumlah pemberitaan negatif bidang PDSPKP terhadap total pemberitaan sektor KP (%)	≤5
		6	Persentase pemenuhan dokumen Maturitas SPIP Ditjen PDSPKP (%)	100
		7	Indeks Profesionalitas ASN Lingkungan Setditjen PDSPKP (Indeks)	83,2
		8	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Setditjen PDSPKP (Nilai)	80,5
		9	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Lingkungan Sekretariat Ditjen PDSPKP (%)	≤0,5
		10	Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di Lingkungan Setditjen PDSPKP (%)	75
		11	Persentase Unit kerja di Lingkungan Sekretariat Ditjen PDSPKP yang menerapkan manajemen pengetahuan terstandar (%)	92

		12	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Setditjen PDSPKP (Nilai)	89
		13	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) di Lingkungan Sekretariat Ditjen PDSPKP (Nilai)	86
		14	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Ditjen PDSPKP (%)	77,5
		15	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Setditjen PDSPKP (%)	77,5
		16	Persentase Lembar Kerja Data Produksi yang Tervalidasi Setditjen PDSPKP (%)	100
2	Terwujudnya Layanan Sarana dan Prasarana Internal lingkup Ditjen PDSPKP yang efisien, efektif dan berorientasi pada layanan prima	17	Persentase pemenuhan layanan internal/ <i>overhead</i> lingkup Ditjen PDSPKP (%)	100
3	Terwujudnya pelaksanaan layanan Perkantoran lingkup Ditjen PDSPKP yang efisien, efektif dan berorientasi pada layanan prima	18	Jumlah pemenuhan layanan perkantoran lingkup Ditjen DJPDSPKP (Bulan)	12

DATA ANGGARAN

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	95.861.679.000
Total Anggaran Sekretariat Ditjen PDSPKP Tahun 2023		95.861.679.000

Jakarta, Januari 2023

**Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Penguatan
Daya Saing Produk Kelautan dan
Perikanan**



Ishartini

**Pihak Pertama,
Sekretaris Direktorat
Jenderal Penguatan Daya
Saing Produk Kelautan dan
Perikanan**



Machmud



REALISASI BELANJA PER JENIS KEGIATAN

Kode Kegiatan : 2361 | DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL LINGKUP DITJEN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN Bulan : 01 s.d. 03

NO	Kode Nama Kegiatan	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	2361 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	PAGU REALISASI	60,500,000,000 9,691,094,342 (16.02%)	73,138,200,000 8,464,802,637 (11.57%)	4,441,800,000 817,000,000 (18.39%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	138,080,000,000 18,972,896,979 (13.74%)
		SISA	50,808,905,658	64,673,397,363	3,624,800,000	0	0	0	0	0	0	119,107,103,021
GRAND TOTAL		PAGU REALISASI	60,500,000,000 9,691,094,342 (16.02%)	73,138,200,000 8,464,802,637 (11.57%)	4,441,800,000 817,000,000 (18.39%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	138,080,000,000 18,972,896,979 (13.74%)
		SISA	50,808,905,658	64,673,397,363	3,624,800,000	0	0	0	0	0	0	119,107,103,021



Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
Gedung Mina Bahari III Lantai 14
Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat
Kementerian Kelautan dan Perikanan